

PARTISIPASI MASYARAKAT SEKOLAH

Oleh:

Apridayani Marasabessy¹

Suratni Muhammad²

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk; 1) memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait pengertian partisipasi; 2) memberikan pemahaman kepada pembaca terkait bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam sekolah. Apalagi sekolah saat ini dituntut untuk mandiri dalam mengelola kurikulum dan kebijakan. Dengan bersandar pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat dan Sekolah

Pengantar

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional memang sudah cukup jelas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang berlaku pula dalam hal biaya, maka hal yang perlu mendapat perhatian kaitannya dengan pelibatan (partisipasi) masyarakat agar sesuai dengan harapan demi terwujudnya kualitas pendidikan yang tinggi adalah membangun suatu strategi yang dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Otonomi mengisyaratkan peluang besar pada sekolah untuk lebih berkembang secara maksimal tanpa kehilangan identitasnya, karena di dalamnya mengandung makna partisipasi atau keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah. Wujud keterlibatan masyarakat dimaksud, bukan sekedar dalam bentuk finansial, tetapi keterlibatan yang diharapkan adalah lebih dari itu, demi tercapainya peningkatan mutu sekolah secara universal.

Salah satu indikasi belum sepenuhnya partisipasi masyarakat di era otonomi yaitu, karena ada anggapan bahwa tanggungjawab pendidikan ada pada pihak sekolah dan pemerintah, sedang orang tua/wali peserta didik cukup mendukung input pendidikan melalui pembiayaan yang diwajibkan sekolah. Perihal ini

tentunya harus diperbaiki, karena jika tidak diperbaiki maka dikhawatirkan akan semakin menjauhkan sekolah dari lingkungan masyarakatnya, sekaligus memudahkan makna Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) itu sendiri.

Untuk memenuhi tujuan sekolah dan tercapainya harapan MBS maka perlu peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa sebagai subsistem sekolah, sehingga kepadanya dapat mendukung pihak sekolah dalam menerapkan MBS.

Pengertian Partisipasi

Menurut Made Pidarta (1988: 28) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kehidupan bangsa yang mandiri. Dalam buku Ackerman dan Alscott yang terkenal (H.A.R. Tilaar: 2003), *The Stakeholder Society*, dijelaskan bahwa masyarakat dewasa saat ini merupakan masyarakat yang sadar akan apa yang ingin dicapainya. Dengan pemerataan serta meningkatnya mutu pendidikan maka kesadaran manusia untuk bermasyarakat semakin tinggi

sehingga menuntut sesuatu yang jelas dari lembaga-lembaga sosial (*social institution*).

Dalam *The Stakeholders Society* dijelaskan bahwa orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah nasional merupakan para *stakeholders* dari pendidikan. Pada masa Orba, pendidikan telah terhempas dari masyarakat dan telah menjadi milik penguasa (elit). Masyarakat tidak mempunyai suara terhadap pendidikannya di lembaga pendidikan, masyarakat menerima saja apa yang direkayasa pemerintah dengan birokrasinya dalam pendidikan. Sesuai dengan perkembangan masyarakat demokrasi, maka sikap masyarakat yang pasif serta kekuasaan pemerintah yang tidak terbatas terhadap pendidikan sudah harus dihilangkan. Selain itu, realitas yang ada dan telah mengakar sebagai tradisi adalah mengubah tradisi sekolah yang menggantungkan diri lebih banyak pada subsidi pemerintah ketimbang berbasis pada kemampuan dan daya sumbang masyarakat lokal yang dimiliki.

Di lingkungan sekitar kerap mendengar masyarakat menuntut pendidikan persekolahan yang serba gratis dalam hal pembiayaan. Walaupun banyak pula yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah elite bahkan di luar negeri dengan biaya yang mahal. Bentuk fenomenal ini merupakan perwajahan budaya nyata bangsa, terutama dilihat dari apresiasi masyarakat terhadap lembaga sekolah. Dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang diambil antara lain, memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan. Pemerintah mengedepankan pembangunan bangsa melalui pendidikan, dimana melihat kenyataan bahwa berdasarkan data UNDP tentang *Human Development Index* (HDI: 2010) menunjukkan dari 178 negara di dunia, Indonesia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, yakni peringkat 111, sementara sebagian negara Asean dan Asia berada di atas Indonesia. Permasalahan pendidikan yang sangat krusial adalah rendahnya mutu pendidikan (Rodliyah, 2013: 2-3).

Salah satu faktor penyebabnya antara lain, minimnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan perencanaan di sekolah, seperti komite sekolah

secara sepihak menetapkan biaya pendidikan yang menurut orang tua cukup tinggi biayanya yang seharusnya bisa dipenuhi melalui bantuan operasional sekolah, komite sekolah tidak mengajak untuk bermusyawarah-mufakat bersama-sama dan menggubris pendapat orang tua. Sehingga, masyarakat kurang merasa memiliki, kurang bertanggungjawab, memelihara dan membina sekolah di mana anak-anaknya sekolah, dan partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan input (dana) Astuti dkk. (2011:13).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Diana (2012) bahwa partisipasi masyarakat masih termasuk kategori sedang dalam pendirian dan pembiayaan lembaga, dalam memberikan dukungan moral dan keterlibatan pembuatan keputusan lembaga. Dewasa ini seakan-akan pendidikan itu hanya dimiliki oleh pemerintah dengan birokrasinya. Apa yang diinginkan pemerintah dan yang dilaksanakan oleh birokrasi termasuk para pendidiknya, tidak boleh dinilai oleh masyarakat yang sebenarnya merupakan pemilik dari pendidikan itu. Masyarakat adalah salah satu stakeholder terpenting dalam pendidikan. Pendidikan adalah milik masyarakat. Masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada lembaga yang bernama sekolah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk pajak, mempunyai hak untuk mengetahui dan mengontrol apa yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikannya. Inilah lembaga pendidikan dalam masyarakat demokratis. Dengan begitu berarti yang menjadi taruhan ialah visi, misi serta program yang dilaksanakan di lembaga pendidikan yang perlu juga diketahui oleh masyarakat. Masyarakat berhak ikut serta dalam setiap proses pelaksanaan pendidikan sejak pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari lembaga-lembaga pendidikan. Perluasan keikutsertaan masyarakat dalam sistem manajemen persekolahan merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pencapaian mutu sekolah/madarasah dan tujuan pendidikan.

Sekolah dalam hal ini tidak lagi hanya milik sekolah, melainkan hakikat sekolah sebagai sub-sistem dalam sistem masyarakat di mana fungsi pendidikan dikembalikan secara utuh dalam melestarikan nilai-nilai yang ada di

masyarakat, dan masyarakat secara bersama-sama membangun dan meningkatkan segala upaya untuk memajukan sekolah. Hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat menyadari pentingnya peranan mereka dalam sekolah. Hal ini dapat tercipta apabila sekolah mau membuka diri dan menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam upaya membantu sekolah untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi yang tinggi tampaknya belum terjadi di negara berkembang seperti Indonesia.

Hoyneman dan Loxley (Rodliyah, 2013: 51) menyatakan bahwa di negara berkembang, sebagian besar keluarga belum dapat diharapkan untuk lebih banyak membantu dan mengarahkan belajar siswa, sehingga siswa di negara berkembang memiliki sedikit waktu yang digunakan dalam belajar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat/orang tua murid yang belum paham makna mendasar dari peran mereka terhadap pendidikan anak.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Partisipasi

Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat/orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Ahmad Sudrajat (2010) adalah sebagai berikut:

- 1) *Integrity*. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik. Hindarkan sejauh mungkin upaya menyembunyikan (*hidden activity*) kegiatan yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh sekolah, untuk menghindari salah persepsi serta

kecurigaan terhadap sekolah. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Oleh sebab itu sekolah harus sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan adanya salah persepsi, salah interpretasi tentang informasi yang disajikan dengan melengkapi informasi yang akurat dan data yang lengkap, sehingga dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat/orang tua murid terhadap sekolah, atau dengan kata lain transparansi sekolah sangat diperlukan, lebih-lebih dalam era reformasi dan abad informasi ini, masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. Bahkan tidak jarang penilaian dan persepsi yang disampaikan masyarakatan tentang sekolah sering tidak memiliki dasar dan data yang akurat dan valid. Persepsi yang demikian apabila tidak dihindari akan menyebabkan hal yang negatif bagi sekolah, akibatnya sekolah tidak akan mendapat dukungan bahkan mungkin sekolah hanya akan menunggu waktu kematiannya. Karena dia tidak dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakatnya sendiri.

- 2) *Continuity*. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya hanya 1 kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester/caturwulan, atau hanya dilakukan oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua/masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat selalu beranggapan bahwa apabila ada panggilan sekolah untuk datang ke

sekolah selalu dikaitkan dengan minta bantuan uang. Akibatnya mereka cenderung untuk tidak datang atau sekedar mewakili kepada orang lain untuk menghadiri undangan sekolah. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa undangan kepada orang tua murid dari sekolah sering diwakilkan kehadirannya kepada orang lain, sehingga kehadiran mereka hanya berkisar antara 60%–70% bahkan tidak jarang kurang dari 30%. Apabila ini terkondisi, maka sekolah akan sulit mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan masyarakat. Perkembangan informasi, perkembangan kemajuan sekolah, permasalahan-permasalahan sekolah bahkan permasalahan belajar siswa selalu muncul dan tumbuh setiap saat, karena itu maka diperlukan penjelasan informasi yang terus menerus dari sekolah untuk masyarakat/orang tua murid, sehingga mereka sadar akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya. Maka informasi tentang sekolah yang akan disampaikan kepada masyarakat juga harus di updating setiap saat. Informasi yang sudah out update akan memberikan kesan kurang baik oleh masyarakat kepada sekolah.

- 3) *Simplicity*. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi dalam hal ini sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar (masyarakat setempat). Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa:

- a) Informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti.

Banyak masyarakat yang tidak memahami istilah-istilah yang sangat ilmiah.

- b) Penggunaan kata-kata yang jelas, disukai oleh masyarakat atau akrab bagi pendengar.
 - c) Informasi yang disajikan menggunakan pendekatan budaya setempat.
- 4) *Coverage*. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, factor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat, misalnya program ekstra kurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching dan lain-lain kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat dan *up to date*. Lengkap artinya tidak satu informasipun yang harus ditutupi atau disimpan, padahal masyarakat/orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan (*progress*) sekolah dimana anaknya belajar. Oleh sebab itu informasi kemajuan sekolah, kegagalan/masalah yang dihadapi sekolah serta prestasi yang dapat dicapai sekolah harus dinformasikan kepada masyarakat. Akurat artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang obyektif. Sedangkan *up to date* berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah terakhir. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian sejauh mana sekolah dapat mencapai misi dan visi yang disusunnya.
 - 5) *Constructiveness*. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail

berbagai masalah (*problem dan constrain*) yang dihadapi sekolah. Apabila hal tersebut dapat mereka mengerti, akan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah sesuai dengan permasalahan sekolah yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan bersama. Hal ini menuntut sekolah untuk membuat daftar masalah (*list of problems*) yang perlu dikomunikasikan secara terus menerus kepada sasaran masyarakat tertentu. Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi hendaknya obyektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu, termasuk dalam hal ini memberitahukan kelemahan-kelemahan sekolah dalam memacu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Prinsip ini juga berarti bahwa informasi yang disajikan kepada khalayak sasaran harus dapat membangun kemauan dan merangsang untuk berpikir bagi penerima informasi. Penjelasan yang konstruktif akan menarik bagi masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat tanpa prasangka tertentu, hal ini akan mengarahkan mereka untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan sekolah. Untuk itu informasi yang ramah, obyektif berdasarkan data-data yang ada pada sekolah.

- 6) *Adaptability*. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (*culture*) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan (*home visit*) pada pagi hari. Pengertian-pengertian yang benar dan valid tentang opini serta faktor-faktor yang mendukung

akan dapat menumbuhkan kemauan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam pemecahan persoalan-persoalan yang dihadapi sekolah.

Bentuk-Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Baharuddin (2010: 39) sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam Komite Madrasah
Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, komite sekolah/madrasah adalah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Lebih lanjut Sagala (2010) menjelaskan bahwa kontribusi komite sekolah/madrasah antara lain menyangkut :
 - a. Penyusunan perencanaan strategik sekolah, yaitu strategi pembangunan sekolah/madrasah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan.
 - b. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah/madrasah.
 - c. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi dan ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah/madrasah.
 - d. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah/madrasah terutama yang menyangkut fasilitas.
 - e. Mendorong sekolah/madrasah melakukan internal monitoring (*school self assessment*).
 - f. Membahas hasil-hasil tes. standar yang dilakukan oleh lembaga eksternal dalam upaya menjaga *quality assurance*.
 - g. Membahas laporan tahunan sekolah/madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat

atas penerimaan komite
sekolah/madrasah

2. Partisipasi dalam Dewan Pendidikan

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dilihat dari aspek legalitasnya, Dewan Pendidikan menjadi lebih kuat karena telah diwadahi dalam pasal 56 ayat 2 Undang-undang No. 20 tahun 2003, yang menegaskan bahwa : Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan menurut Sagala (2010: 248) adalah sebagai berikut : a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota; b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan c) menciptakan suasana pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah maupun satuan pendidikan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usaha sendiri. Institusi pendidikan harus mendemonstrasikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Penentuan label/predikat bermutu dari suatu institusi salah satunya dapat ditentukan oleh konsumen (pengguna lulusan).

Organisasi-organisasi yang menganut konsep *Total Quality Management* (TQM) menurut Edward (2010: 55) melihat mutu sebagai sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan-pelanggan mereka. Pelanggan adalah wasit terhadap mutu dan institusi sendiri tidak akan mampu bertahan lama tanpa mereka.

Institusi harus menggunakan semua cara untuk mengeksplorasi kebutuhan pelanggannya. Peningkatan mutu pendidikan terutama di madrasah merupakan sasaran utama dari seluruh proses yang dilaksanakan institusi tersebut secara berkelanjutan. Seringkali upaya peningkatan mutu pendidikan terhalang oleh kualitas pendidikan yang rendah, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Muhaimin (2010: 20) rendahnya kualitas pendidikan akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu berkompetisi di dunia global, dan sekaligus akan berdampak pula pada rendahnya produktivitas, termasuk di dalamnya produktivitas IPTEK dan pendapatan para warga negara. Atas dasar itulah, maka keberadaan lembaga pendidikan di Indonesia sangat merindukan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang sudah mapan.

Kesimpulan

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kehidupan bangsa yang mandiri.

Partisipasi dalam Komite Madrasah Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3. Partisipasi dalam Dewan Pendidikan Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dilihat dari aspek legalitasnya, Dewan Pendidikan menjadi lebih kuat karena telah diwadahi dalam pasal 56 ayat 2 Undang-undang No. 20 tahun 2003, yang menegaskan bahwa : Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan

kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudrajat. 2010. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/10/konsep-dasar-manajemen-peran-serta-masyarakat/>, 20 November 2020.
- Baharuddin. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*, PT. UIN Maliki Press Malang
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward Sallis. 2010. *Total Quality Management In Education*, PT. Ircisode, Yogyakarta
- Muhaimin. 2010. *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana pengembangan Sekolah/madrasah*. PT Prenada Media Group, Jakarta.
- Pidarta, Made. 1988. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*. PT. P2LPTK. Jakarta.
- Rodliyah, St. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaiful Sagala. 2010. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, PT Al-Fabeta, Bandung
- Tilaar, H.A.R. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. PT Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
- Yayan Diana. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK/RA di Kec. Wates Kab. Kulon Progo* Yogyakarta. Skripsi. UNY.